

**PENGARUH KONEKSI POLITIK, KOMPENSASI EKSEKUTIF,
KEPEMILIKAN SAHAM EKSEKUTIF DAN PREFERENSI RISIKO
EKSEKUTIF TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2014-2018)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh :

RAMADHIKA AFNANI

B 200 160 047

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH KONEKSI POLITIK, KOMPENSASI EKSEKUTIF,
KEPEMILIKAN SAHAM EKSEKUTIF, DAN PREFERENSI RISIKO
EKSEKUTIF TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2014-2018)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

RAMADHIKA AFNANI

B 200 160 047

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen

Pembimbing



(Dr. Fatchan Achyani, S.E., M.Si)

NIDN. 06104086801

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH KONEKSI POLITIK, KOMPENSASI EKSEKUTIF,
KEPEMILIKAN SAHAM EKSEKUTIF, DAN PREFERENSI RISIKO
EKSEKUTIF TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK**

(Studi Empirirs pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2014-2018)

Oleh :

RAMADHIKA AFNANI

B 200 160 047

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

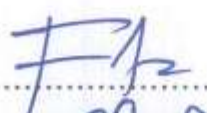

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 12 Februari 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan penguji :

Dewan penguji :

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. Fatchan Achyani, S.E., M.Si
(Ketua Dewan Penguji) | (.....
) |
| 2. Drs. Muh. Abdul Aris, M.Si
(Anggota I Dewan Penguji) | (.....
) |
| 3. Eny Kusumawati, S.E., M.M., Ak., CA.
(Anggota II Dewan Penguji) | (.....
) |

Mengetahui.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya

Surakarta, 12 Februari 2020

Penulis



RAMADHIKA AFNANI

**PENGARUH KONEKSI POLITIK, KOMPENSASI EKSEKUTIF,
KEPEMILIKAN SAHAM EKSEKUTIF, DAN PREFERENSI RISIKO
EKSEKUTIF TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2014-2018)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh koneksi politik, kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan preferensi risiko eksekutif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian yang digunakan adalah 54 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan koneksi politik, kepemilikan saham eksekutif dan preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci : agresivitas pajak, koneksi politik, kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif dan preferensi risiko eksekutif

Abstract

This study aims to examine the effect of political connections, executive compensation, executive share ownership, and executive risk preferences on tax aggressiveness in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The research sample used was 54 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2014 to 2018. The sampling method used was purposive sampling method. The analysis used in this study is multiple linear regression analysis. The results showed that the executive compensation affected the tax aggressiveness. While the political connections, executive share ownership and executive risk preferences do not affect tax aggressiveness.

Keywords : tax aggressiveness, political connection, executive compensation, executive share ownership and executive risk preferences

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan hal yang wajib dalam pelaksanaan perekonomian di Indonesia. Pajak yang berasal dari iuran wajib rakyat merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara dan digunakan untuk keperluan negara yang diatur secara perdata dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar. Pemerintah melakukan pendanaan untuk kesejahteraan rakyat, seperti peningkatan kualitas pendidikan,

kesehatan, pembangunan infrastruktur untuk kemudahan distribusi kebutuhan hidup dan juga pembangunan daerah yang relatif tertinggal.

Indonesia adalah negara yang sumber pendapatannya berasal dari pajak dan non pajak. Tetapi sumber pendapatan terbesar negara masih berasal dari pajak. Pajak memiliki peranan penting dalam pembiayaan negara untuk mencapai tujuan negara. Salah satunya yaitu perusahaan manufaktur yang berada di Indonesia. Perusahaan manufaktur dianggap mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Berita *online* (www.cnbcindonesia.com) pada capaian APBN 2018 penerimaan di sektor perpajakan tercapai Rp 1.315,9 triliun, atau hanya 92% realisasi dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. Artinya kekurangan penerimaan (*shortfall*) pajak sebesar Rp 108,1 triliun. Salah satu permasalahan yang dapat menghambat pencapaian target penerimaan pajak yang optimal adalah *tax aggressiveness*.

Pelaksanaan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik bagi perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi laba bersih, sedangkan bagi pemerintah pajak yang setinggi mungkin akan berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar perusahaan. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak, sedangkan usaha pengurangan pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (Achyani dan Ningrum, 2017)

Agresivitas pajak menjadi salah satu indikator yang dipergunakan untuk melihat usaha penghindaran pajak oleh wajib pajak. Agresivitas pajak dapat dilakukan melalui mekanisme yang digolongkan *tax avoidance* dan *tax evasion* Frank et al (2009). Perusahaan melakukan agresivitas pajak tidak semata bersumber dari ketidak taatan wajib pajak dengan undang-undang perpajakan, melainkan dapat pula dilakukan dari aktivitas yang tujuannya untuk melakukan penghematan dengan memanfaatkan undang-undang tersebut Ridha (2014) dalam Andhari dan Sukartha (2017).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak diantaranya yaitu koneksi politik, kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif dan preferensi risiko eksekutif. Agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan pasti melibatkan pimpinan-pimpinan perusahaan. Sebagai pemimpin perusahaan eksekutif mempunyai pengaruh yang memiliki dampak pada perusahaan atas kebijakan yang diputuskan termasuk untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Faktor pertama yang menyebabkan perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak yaitu adanya koneksi politik. Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memilih pihak-pihak dalam struktur organisasi baik itu komisaris ataupun direksi yang memiliki kedekatan khusus dengan pemerintah Fisman (2001) dalam Anggraeni (2018) koneksi politik yang dimiliki perusahaan menjadi motivasi untuk melakukan *tax aggressiveness* dengan cara memanfaatkan hubungan khusus dengan pemerintah, terlebih bagi perusahaan yang dimiliki langsung oleh pejabat atau orang yang memegang posisi penting di dalam partai politik atau pemerintahan dalam mengungkapkan kewajiban pajaknya untuk melakukan penghindaran pajak agar beban pajak yang dibayarkan perusahaan sedikit sehingga laba perusahaan semakin maksimal.

Faktor kedua yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak yaitu kompensasi eksekutif. Eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak hanya jika ia mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Untuk itu kompensasi tinggi kepada eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima kompensasi yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi. Kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak.

Selain adanya faktor kompensasi eksekutif yang mempengaruhi agresivitas pajak, kepemilikan saham eksekutif juga mempengaruhi praktik agresivitas pajak. Kepemilikan saham merupakan porsi kepemilikan yang ditentukan oleh seberapa besar pernyataan yang ditanamkan di perusahaan tersebut khususnya terhadap saham yang digunakan dalam memegang kontrol dan mempengaruhi jalannya

perusahaan sehingga memberikan pengaruh terhadap kinerja dalam menjalankan suatu perusahaan serta dipercayai untuk dapat mengurangi konflik antara pihak manajemen dan pemegang saham.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu adanya preferensi risiko eksekutif. Risiko adalah akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi karena sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang dan sebagai segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Risiko memiliki pengaruh yang kuat dalam tujuan suatu perusahaan, dengan adanya preferensi risiko di dalam menjalankan strategi kebijakan di suatu perusahaan, eksekutif akan cenderung untuk lebih memperhatikan dampak yang terjadi maupun yang akan terjadi terhadap keputusan yang dibuatnya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Umi Hanafi dan Puji Harto (2014) yang berjudul “Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini penulis menambah satu variabel independen yaitu koneksi politik dan mengganti variabel dependen yaitu agresivitas pajak.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang dapat diperoleh dari Indonesia Stock Exchange (IDX) yang dapat diperoleh dari www.idx.go.id pada tahun 2014-2018. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 270 perusahaan manufaktur dengan sampel penelitian sebanyak 54 perusahaan manufaktur.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit selama tahun penelitian 2014-2018
3. Perusahaan manufaktur yang menghasilkan laba bersih selama tahun penelitian 2014-2018
4. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan.
5. Perusahaan manufaktur yang memiliki data lengkap mengenai variabel-variabel yang akan diteliti berdasarkan periode 2014-2018.

2.1 Agresivitas Pajak

Menurut Frank et al (2009) dalam Susanto dan Viriany (2018) tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak (*tax planning*), baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau illegal (*tax evasion*). Pengukuran agresivitas pajak dalam penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak perusahaan. Proksi model ETR ini mengacu pada penelitian Halioui et al (2016) dalam Sofiati dan Zulaikha (2018) dengan rumus :

$$Effective\ Tax\ Rate = \frac{Beban\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

2.2 Koneksi Politik

Dalam penelitian ini untuk menentukan dalam perusahaan tersebut memiliki adanya koneksi politik dapat dilihat menggunakan proksi ada atau tidaknya kepemilikan langsung pemerintah pada perusahaan. Menurut Ferdiawan dan Firmansyah (2017) koneksi politik dapat dilihat dari kategori yang menyatakan bahwa direktur atau komisaris di perusahaan merupakan anggota dan mantan anggota DPR, anggota kabinet eksekutif, pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer atau anggota partai politik. Koneksi politik dapat diukur dengan variabel dummy, dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang salah satu eksekutifnya adalah pejabat institusi pemerintah dan 0 jika tidak.

2.3 Kompensasi Eksekutif

Seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) pengukuran kompensasi yang digunakan adalah logaritma natural dari total kompensasi yang diterima eksekutif. Data kompensasi eksekutif terdapat dalam annual report perusahaan. Kompensasi eksekutif dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Kompensasi Eksekutif} = \text{Ln}(\text{Kompensasi Eksekutif})$$

2.4 Kepemilikan Saham Eksekutif

Seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) indikator pengukuran kepemilikan saham eksekutif dalam penelitiannya adalah presentase jumlah saham yang dimiliki eksekutif terhadap jumlah saham yang beredar. Variabel kepemilikan saham eksekutif diukur dengan melihat data kepemilikan saham yang terdapat dalam annual report perusahaan (Irawan 2012).

Kepemilikan saham eksekutif dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Saham Eksekutif} = \% \text{ Jumlah Saham Eksekutif}$$

2.5 Preferensi Risiko Eksekutif

Pengukuran preferensi risiko eksekutif dalam penelitian ini sama seperti pengukuran yang dilakukan oleh Budiman (2012) dalam Hanafi dan Harto (2014) yang menggunakan risiko perusahaan sebagai proksi pengukurannya. Risiko perusahaan mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari earning baik penyimpangan yang bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan. Semakin besar deviasi earning perusahaan mengindikasikan eksekutif memiliki preferensi risk taking dan begitu pula sebaliknya. Menurut Paligrova (2010) yang dikutip Hanafi dan Harto (2014), risiko perusahaan dapat diukur dengan :

$$RISK = \sqrt{\frac{\sum_{T-1}^T (E - 1/T \sum_{T-1}^T E)^2}{(T - 1)}}$$

Keterangan:

E = EBITDA (*Earning Before Interest Tax Depreciation Amortization*)/ Total Asset

T = Total Sampel

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$AP = \alpha + \beta_1 KP + \beta_2 KPE + \beta_3 KSE + \beta_4 PRE + e$$

Keterangan :

AP : Agresivitas Pajak

α : Konstanta

KP : Koneksi Politik

KPE : Kompensasi Eksekutif

KSE : Kepemilikan Saham Eksekutif

PRE : Preferensi Risiko Eksekutif

e : Error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2018. Total populasi sebesar 270 perusahaan manufaktur dengan menggunakan metode *purposive sampling*, maka data yang dijadikan sampel sebesar 54 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria penelitian selama periode 2014-2018. Berdasarkan uji asumsi klasik, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Uji Normalitas	Uji Multikolinearitas		Uji Autokorelasi	Uji Heterokedastisitas
		Tolerance	VIF		
KP	Asymp.	0,687	1,457	Run Test	0,500
KPE	Sig. (2-tailed)	0,585	1,711	dengan Asymp.	0,143
KSE		0,521	1,918	Sig. (2-tailed)	0,355
PRE	0,054	0,969	1,032	0,911	0,737

Sumber: Hasil olah data 2020

Berdasarkan Uji Asumsi Klasik didapat hasil Uji Normalitas dengan *Kolmogrov-smirnov Z* sebesar $0,054 > 0,05$ atau 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terdistribusi normal karena memenuhi asumsi normalitas atau dapat dikatakan sebaran data dalam penelitian ini digolongkan terdistribusi normal. Selanjutnya, hasil Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (koneksi politik, kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan preferensi risiko eksekutif) memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan VIF < 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Berdasarkan hasil Uji Heteroskedastisitas bahwa seluruh variabel independen (koneksi politik, kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan preferensi risiko eksekutif) memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel pada model regresi tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil Uji Autokorelasi diperoleh hasil Run Test sebesar 0,911 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Reg.	T _{hitung}	Sig.	Keterangan
(Constant)	0,463	7,527	0,000	
KP	0,013	1,642	0,105	Tidak Signifikan
KPE	-0,009	-3,556	0,001	Signifikan
KSE	0,009	0,384	0,702	Tidak Signifikan
PRE	-0,135	-1,780	0,079	Tidak Signifikan
R ² 0,251		F _{hitung} 6,211		
Adjusted R ² 0,211		Sig. 0,000		

Sumber: Hasil olah data 2020

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut :

$$AP = 0,463 + 0,013 KP - 0,009 KPE + 0,009 KSE - 0,135 PRE + e$$

Berdasarkan Uji F diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan *level of signifikan* yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan model *goodness of fit*. Uji Koefisien Determinasi menunjukkan nilai

Adjusted R^2 sebesar 0,211 atau 21,1%. Ini menunjukkan bahwa 21,1% variabel agresivitas pajak dapat dijelaskan oleh variabel koneksi politik, kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan preferensi risiko eksekutif. Sedangkan 78,9% variabel agresivitas dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model, karena terbatasnya dalam penelitian.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini ditunjukkan melalui nilai t hitung $1,642 > 0,105$ dengan tingkat signifikansi $0,105$ lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka **h_1 ditolak**. Perusahaan tidak memanfaatkan koneksi politik baik dari dewan komisaris maupun dewan direksi yang dimiliki untuk dapat membayar beban pajak perusahaan yang rendah. Perusahaan ingin dapat tetap bekerja dengan baik dan memberikan kontribusi kepada negara melalui setoran pajak yang ada. Hal ini membuat perusahaan ingin menjaga nama baik dan citra perusahaan di mata masyarakat, investor dan pemerintah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Pratomo dan Asalam (2019) dan Anggraeni (2018) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian dari Pranoto dan Widagdo (2015) dan Wicaksono (2017) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

3.2.2 Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini ditunjukkan melalui nilai t hitung $-3,556 > 0,001$ dengan tingkat signifikansi $0,001$ lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka **h_2 diterima**. Semakin besar kompensasi yang diterima eksekutif maka akan memotivasi eksekutif untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Untuk itu pemberian kompensasi adalah hal yang tepat bagi eksekutif dan menjadi cara efektif agar upaya efisiensi pembayaran pajak perusahaan dapat tercapai. Oleh karena itu eksekutif akan bersedia melakukan

suatu tindakan kebijakan termasuk melakukan agresivitas pajak dan eksekutif akan mendapat keuntungan atas kebijakan yang dibuatnya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Sofiati dan Zulaikha (2018), Hariyanto dan Utomo (2018), Rosidy dan Nugroho (2019), serta Yuwono dan Fuad (2019). Namun hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Prayogo dan Darsono (2015) dan Kurnia, Pratomo dan Handoko (2019)

3.2.3 Pengaruh kepemilikan saham eksekutif terhadap agresivitas pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kepemilikan saham eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini ditunjukkan melalui nilai t hitung $0,384 < 0,702$ dengan tingkat signifikansi $0,702$ lebih besar dari $\alpha = 0,702$ maka **h_3 ditolak**. Hal ini berarti bahwa tinggi atau rendahnya saham yang dimiliki eksekutif tidak mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Selain itu kepemilikan saham eksekutif dalam penelitian ini tidak terlalu tinggi yang menyebabkan eksekutif tidak terlalu agresif dalam keputusan mengenai tindakan agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prayogo dan Darsono (2015) dan Putri, Zaitul dan Darmayanti (2015). Namun penelitian ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) dan Mayangsari (2015).

3.2.4 Pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap agresivitas pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa variabel preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini ditunjukkan melalui nilai t hitung $-1,780 < 0,079$ dengan tingkat signifikansi $0,079$ lebih besar dari $\alpha = 0,079$ maka **h_4 ditolak**. Meskipun dengan adanya risiko mampu memberikan dampak terhadap eksekutif dalam hasil pembuatan keputusan mengenai pembayaran pajak akan tetapi dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Eksekutif sebagai penentu keputusan akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum bertindak. Dampak dari suatu tindakan juga akan dianalisis dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan terbaik bagi perusahaan, termasuk dalam menentukan keputusan dalam agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2015). Namun penelitian ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014), Asri dan Suardana (2016), serta Wiguna dan Jati (2017).

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh koneksi politik, kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan preferensi risiko eksekutif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dari hasil pembahasan pada bab empat, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Koneksi politik mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,105 lebih besar dari *alpha* 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga **H₁ ditolak**.
- 2) Kompensasi eksekutif mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari *alpha* 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga **H₂ diterima**.
- 3) Kepemilikan saham eksekutif mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,702 lebih besar dari *alpha* 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan saham eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga **H₃ ditolak**.
- 4) Preferensi risiko eksekutif mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,079 lebih besar dari *alpha* 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga **H₄ ditolak**.

4.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yang perlu diperhatikan bagi peneliti-peneliti selanjutnya sebagai berikut ;

- 1) Penelitian ini hanya menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan hanya menggunakan periode yang terbatas yaitu periode tahun 2014 sampai dengan 2018. Sehingga sampel yang

digunakan hanya terbatas dan hasil penelitian ini tidak dapat sepenuhnya mewakili semua sektor perusahaan yang ada dalam Bursa Efek Indonesia (BEI).

- 2) Sampel dalam penelitian ini sangat sedikit yaitu hanya 54 perusahaan manufaktur dari 184 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- 3) Variabel yang digunakan yaitu koneksi politik, kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan preferensi risiko eksekutif hanya mampu mengungkapkan pengaruhnya terhadap agresivitas pajak sebesar 21,1%. Sedangkan 78,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model sehingga belum mewakili sebagian besar dari faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.

4.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran bagi peneliti selanjutnya guna meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu :

- 1) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek dalam penelitian sehingga tidak terfokus pada perusahaan manufaktur saja. Melainkan dapat menambah objek penelitian lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) agar hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan.
- 2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang dapat dijadikan variabel dalam penelitian, yang memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak seperti *corporate governance*, kepemilikan keluarga, kepemilikan mayoritas, *inventory intensity*, *capital intensity* dan lain sebagainya.
- 3) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode tahun penelitian, agar dapat menjelaskan hubungan pengaruh dan menunjukkan hasil yang akurat.
- 4) Bagi perusahaan diharapkan kepada eksekutif untuk tidak melakukan tindakan yang diambil terkait dengan pembayaran beban pajak.

- 5) Bagi pemerintah diharapkan memperjelas undang-undang dan sanksi yang tegas untuk wajib pajak yang melakukan tindakan agresivitas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, Fatchan dan Ningrum, Afrilia. 2017. “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak”. Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Aalin, Elmi. 2018. “Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak” *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)* Vol 3 No 2
- Andahari, Putu dan Sukartha, Made. 2017. “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Inventory Intensity*, *Capital Intensity* dan Leverage Pada Agresivitas Pajak” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol 18 No 3 : 2115-2142
- Anggraini, Rika. 2018. “Pengaruh Koneksi Politik Terhadap *Tax Aggressiveness*”
- Asri, Ida dan Suardana, Ketut. 2016. “Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol 16 No 1 : 72-100
- Ferdiawan, Yopi dan Firmansyah, Amrie. 2017 “Pengaruh *Political Connection*, *Foreign Activity*, dan *Real Earnings Management* Terhadap *Tax Avoidance*” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol 5 No 3, 1601-1624
- Hanafi, Umi dan Harto, Puji. 2014. “Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan” *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol 3 No 2 Halaman 1-11
- Harianto, Firdaus dan Utomo, Dwi. 2018. “Pengaruh *Corporate Governance* dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak” *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol 7 No 4 Halaman 1-14
- Hidayat, Kholid, Arles Ompusunggu dan Suratno. 2016 “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Insentif Pajak Sebagai Pemoderasi” *JIFAE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)* Vol 2 No 2
- Ingit, Iswari, 2019 “Kinerja Pajak 2018, Lagi-Lagi Tak Capai Target” www.cnbcindonesia.com (diakses pada tanggal 11 Agustus 2019 pukul 11.20)
- Luke dan Zulaikha. 2016 “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak” *Jurnal Akuntansi & Auditing* Vol 13 No 1
- Lestari, Popy, Dudi Pratomo dan Asalam. 2019. “Pengaruh Koneksi Politik dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak” *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 11 (1), 2019, 41-54
- Mayangsari, Cindy. 2015 “Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak” *Jom FEKON* Vol 2 No 2

- Mujiyati dan Aris, Abdul. 2016. *Inti Perpajakan Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press (MUP).
- Prayogo, Kosyi dan Darsono. 2015 “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak” *Diponegoro Jurnal Of Accounting* Vol 4 No 3 Halaman 1-12
- Pranoto, Bayu dan Widagdo, Ari. 2015. “Pengaruh Koneksi Politik dan *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak” Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper
- Purwanggono, Erlang dan Rahman, Abdul. 2015. “Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas Pajak” *Diponegoro Jurnal Of Accounting* Vol 4 No 2 Halaman 1-13
- Putri, Elvia, Zaitul dan Yeasy Darmayanti. 2015. “Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Kualitas Audit Sebagai Pemoderasi”
- Riani. 2011. *Prespektif Kompensasi Perusahaan, CEO, dan Karyawan*. Surakarta: Yuma Pustaka
- Rosidy, Devandanny dan Nugroho, Rahadi. 2019. “Pengaruh Komisaris Independen dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak” *Jurnal Info Artha* Vol.3, No.1, (2019), Hal 55-56
- Sofiati, Siti dan Zulaikha. 2018. “Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak” *Diponegoro Jurnal Of Accounting* Vol 7 No 4 Halaman 1-14
- Wicaksono, Agung. 2017. “Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia” *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi* Vol 10 (I) P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190 Page 167-180
- Wiguna, Putu dan Jati, Ketut. 2017 “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Preferensi Risiko Eksekutif, dan *Capital Intensity* Pada Penghindaran Pajak” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol 21 No 1 : 418-446
- Yuwono dan Fuad. 2019. “Pengaruh *Corporate Governance* dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak” *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol 8 No 3 Halaman 1